

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**  
**PANGAN OLAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 07 Januari 2021

Pihak Kedua



(Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes)

Pihak Pertama



(Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**  
**PANGAN OLAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	52	UMKM
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	32	Persen
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	82	Persen
2	Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	160	Kab/Kota
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	82	Persen
3	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	86	Indeks
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	18.000	Jumlah
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	Jumlah
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	89,37	Nilai
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,46	Indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
5	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	203	Jumlah
6	Meningkatnya UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100	Persen
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks RB Dit. PMPU	90	Indeks
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU	77	Indeks
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2	Indeks
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU	91	Persen

Kegiatan

Anggaran (Rp) :

1.	Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	44,050,000
2.	Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	989,500,000
3.	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	453,250,000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan	353,000,000
5.	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	69,150,000
6.	TOT Fasilitator Keamanan Pangan	112,800,000
7.	Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Fasilitator	241,140,000
8.	Pengembangan Subsite Istana UMKM	70,700,000
9.	Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM	368,690,000
10.	Fasilitasi Penerapan CPPOB bagi UMKM	1,188,120,000
11.	Pembinaan Pelaku Usaha Ritel Pangan Modern dalam Penerapan Cara Ritel yang Baik pada Ritel Modern	500,000,000

12.	Administrasi SATKER pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	70,000,000
13.	Advokasi Keamanan Pangan	550,060,000
14.	Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	364,200,000
15.	Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPPIRT	810,170,000
16.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu	327,500,000
17.	Monitoring, Evaluasi serta Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Peraturan BPOM mengenai IRTP	326,354,000
18.	Peningkatan Kompetensi Petugas	297,956,000
19.	Workshop Keamanan Pangan Nasional	100,800,000
20.	Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	400,000,000
21.	Koordinasi Lintas Sektor PJAS	226,420,000
22.	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	514,512,000
23.	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Aman dari BB	572,640,000
24.	Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS	860,350,000
25.	Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka CPE (ASEAN Health Cluster 4)	63,400,000
26.	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	320,120,000
27.	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Aman dari BB	180,100,000
28.	Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	198,120,000
29.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	109,728,000
30.	Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Aman dari BB	22,640,000
31.	Pelatihan Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah untuk Petugas BB/BPOM/Loka POM	127,600,000
32.	Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	146,950,000
33.	Lomba Desa Pangan Aman	200,000,000
34.	Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	324,620,000

Jakarta, 07 Januari 2021

Deputi Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan

(Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes)

Direktur Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Pangan Olahan

(Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME)